

RENCANA STRATEGIS REVISI II **BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG** **2020-2024**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya Master Plan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 2020-2024 dapat diselesaikan.

Rencana Startegis ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2020 Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Rencana Strategis ini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dan mungkin timbul, dan disusun untuk menjadi acuan bagi balai dalam penetapan program, kegiatan dan anggaran tahun 2020-2024.

Sebagai sebuah rencana, masih terbuka kemungkinan adanya perubahan sesuai perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu segala saran untuk penyempurnaan rencana strategis ini sangat kami harapkan.



Binuang, Februari 2020

Kepala BBPP Binuang,

Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M. Si
Nip. 19670731 199303 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	4
C. Potensi dan Permasalahan	5
II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi	18
B. Misi	21
C. Tujuan	22
D. Sasaran Strategis.....	24
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan	28
B. Kerangka Regulasi	35
C. Kerangka Kelembagaan.....	36
IV. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	
A. Arah Kebijakan	13
B. Kerangka Regulasi	14
C. Kerangka Kelembagaan.....	14
V. PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Program	41
B. Rencana Aksi	41
VI. PENUTUP	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah Pembangunan pertanian pada periode 2020 - 2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesai yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri dicirikan dengan adanya kebebasan dan kedaulatan dalam segala hal terkait dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan, khususnya di bidang pertanian tropika. Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha, politik dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada system penyangga kehidupan lain. Adanya peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi pangan dan ancaman wabah penyakit. Adanya pandemi covid-19 membuat sektor pertanian menempati posisi

yang semakin sentral. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan berkualitas bagi penduduk Indonesia sebanyak 273 juta jiwa, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global melalui pembangunan kawasan pertanian berskala ekonomi.

Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi pertanian Langkah utama pembangunan pertanian nasional agar sector pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,7-6,0% per tahun, yang didorong dengan peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan SDM. Stabilitas inflasi juga tetap menjadi prioritas untuk dijaga agar labil dengan tren menurun menjadi sekitar 2,7% pada tahun 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Salah satu kunci untuk dapat mencapai sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha perlu menjabarkan lebih lanjut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam

melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

Dinamika lingkungan strategis yang berubah sangat cepat membuat Insititusi merespon dengan melakukan Revisi 2 Renstra Kementerian Pertanian sehingga menyebabkan Renstra BPPSDMP 2020-2024 perlu direvisi. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan perubahan ini yaitu: 1) Amanat PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, 2) SEB MENKEU dan MENTERI PPN tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dan 3) Respon terhadap kondisi pandemic Covid-19.

Guna mencapai arah pembangunan pertanian tersebut, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur”. Dalam melaksanakan tugas Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang telah menetapkan Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Periode 2020 – 2024 dan telah menetapkan visi “Menjadi *Center of Excellence* dalam menyelenggarakan pelatihan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pusat Pelatihan Pertanian yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Pusat Pelatihan Pertanian periode 2020 - 2024, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang merumuskan Renstra yang berisi upaya-upaya dukungan terhadap Pusat Pelatihan Pertanian terhadap pencapaian kesejahteraan petani melalui SDM berkualitas dan berdaya saing berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan.

B. Kondisi Umum

Pembangunan sektor pertanian saat ini masih memegang peranan yang sangat penting sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyedia bahan pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja.

Salah satu faktor kunci untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah sumberdaya manusia pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing. Sumberdaya manusia tersebut terdiri dari petugas/aparatur lingkup pertanian di pusat dan di daerah, pelaku utama (petani, peternak dan pekebun) serta pelaku usaha agribisnis lainnya. Pembangunan sumberdaya manusia pertanian dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya dilakukan antara lain melalui pelatihan. Di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pelatihan diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Pelatihan Pertanian, di antaranya Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang (BBPP Binuang)

Pelatihan yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang saat ini adalah pelatihan berbasis pembangunan SDM pertanian yang professional, mandiri dan berdaya saing.

BBPP Binuang menyelenggarakan pelatihan bagi peserta aparatur dan non-aparatur yang berasal dari wilayah Kalimantan, yakni Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 57 kabupaten/kota yang mengirim peserta ke BBPP Binuang, yang terdiri dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan; 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah; 11 kabupaten/kota di Kalimantan Timur; 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara; dan 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Proses pembangunan SDM Pertanian perlu memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal sebagai dasar pijakan penyusunan kebijakan dan strategi.

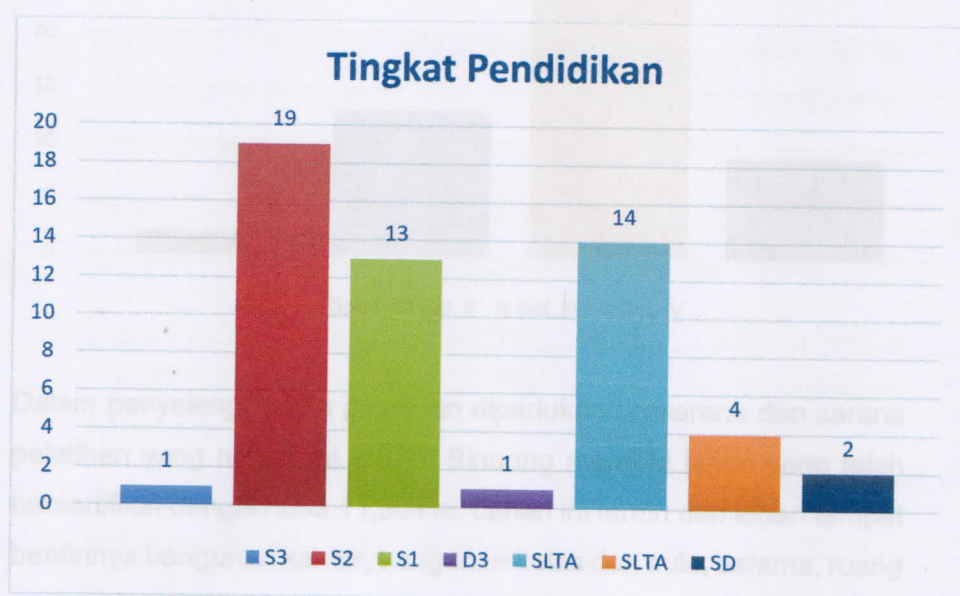
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang menyelenggarakan fungsi antara lain: (i) pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian; (ii) pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur; (iii) pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri; (iv) pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur; (v) pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian; (vi) pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian; (vii) pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi pasang surut; dan (viii) pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.

BBPP Binuang memiliki potensi dan permasalahan yang dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan strategis internal serta peluang dan ancaman/tantangan sebagai lingkungan strategis eksternal, kekuatan (Strenght) yang dimiliki oleh BBPP Binuang diantaranya:

- a. BBPP Binuang terletak pada lokasi strategis di tepi jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,
- b. BBPP Binuang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan
- c. Tenaga Sumber Daya Manusia dan Widyaiswara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 ini BBPP Binuang didukung oleh 54 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 30 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya manusia PNS BBPP Binuang terdiri dari 1 orang lulusan S3; 19 orang lulusan S2; 13 orang lulusan S1/D4; 1 orang lulusan D3; 14 orang lulusan SLTA; 4 orang lulusan SLTP; dan 2 orang SD. Diantara 54 orang PNS BBPP Binuang terdapat 11 orang pejabat struktural, yaitu 1 orang Kepala Balai, 3 orang Kepala Bagian/Bidang, dan 7 orang Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi.

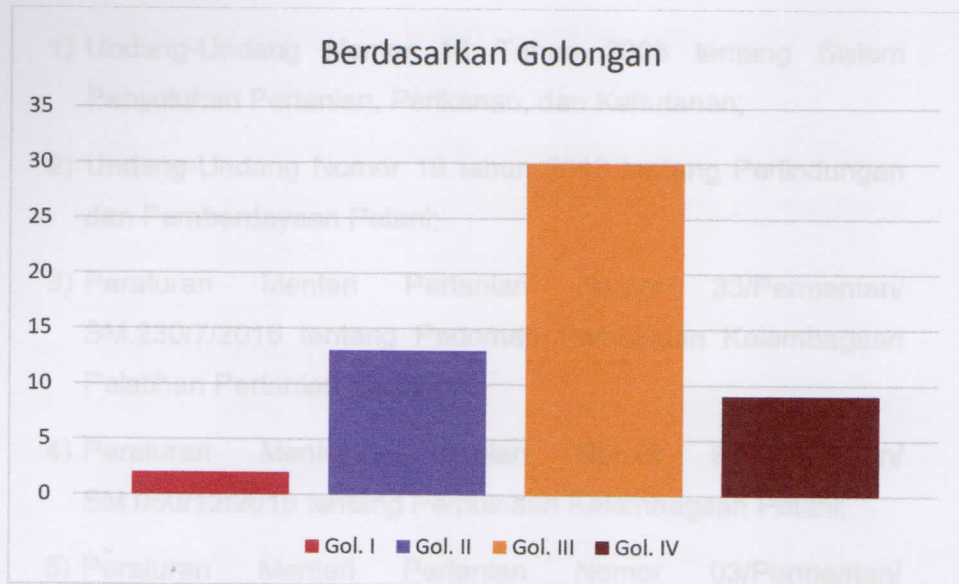
Grafik Tingkat Pendidikan



BBPP Binuang memiliki 8 orang pejabat fungsional Widyaiswara, yang terdiri dari lima orang widyaiswara memiliki spesialisasi Budidaya Pertanian, dua orang widyaiswara memiliki spesialisasi Penyuluhan Pertanian, dari 1 orang memiliki spesialisasi pengolahan hasil pertanian. Semua widyaiswara berpendidikan S2; dan 10 orang Calon Widyaiswara orang berpendidikan S2 .

Komposisi pegawai BBPP Binuang berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin serta jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, jenis kelamin, dan spesialisasi yang diampu disajikan pada Lampiran 2.

Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Dalam penyelenggaraan pelatihan diperlukan prasarana dan sarana pelatihan yang memadai. BBPP Binuang memiliki lahan yang telah bersertifikat dengan luas 11,88 Ha. Lahan ini terdiri dari lahan tempat berdirinya bangunan kantor, bangunan kelas dan aula, asrama, ruang makan, guest house, perpustakaan, mushalla, laboratorium, bengkel, screen house, instalasi pengolahan pupuk, lapangan olahraga bulu tangkis, dan lahan praktek berupa kebun karet, kebun kelapa sawit, kebun kakou, kebun palawija, kebun hortikultura, dan sawah. Prasarana diklat yang dimiliki BBPP Binuang sampai saat ini selain kantor dapat dilihat pada Lampiran 3.

d. Regulasi

Regulasi dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan SDM pertanian mutlak diperlukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Regulasi tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019;
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian.

2. Permasalahan

1) Kelemahan (Weakness)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BBPP Binuang adalah:

- a. Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappenas menunjukkan bahwa masih belum banyak teknologi yang diaplikasikan. Diseminasi informasi dan teknologi pertanian kepada petani merupakan tugas dan tanggung jawab Penyuluh Pertanian dengan ujung tombak Penyuluh Pertanian yang berada di BPP selaku kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan. BPP sebagai pos simpul koordinasi dan pusat program dan kegiatan terkait dengan penerapan paket rekomendasi teknologi terapan kepada petani dan kelompok tani
- b. Pendidikan dan Usia Kapasitas Petani Masih Rendah

Pendidikan dan kapasitas petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia

tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%.

c. Kapasitas Kelembagaan Petani Masih Rendah

Kapasitas Kelembagaan Petani dimaknai sebagai persentase kelembagaan petani (Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan/atau Korporasi Petani yang ditumbuhkan dan dikembangkan serta dievaluasi secara berkelanjutan. KEP tersebut dapat berbentuk Koperasi Tani, PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), KUB (Kelompok Usaha Bersama), LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan bentuk lainnya.

d. Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan

Jumlah petani menurun diindikasikan oleh usia petani yang umumnya sudah lanjut dan tidak ada minat para generasi muda untuk terjun pada bidang pertanian. Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya peningkatan produksi bahkan untuk menuju lumbung pangan dunia 2045.

e. SDM Pertanian yang tersertifikasi masih terbatas

SDM yang kompeten adalah SDM pertanian yang kompetensinya diakui oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi yaitu BNSP, LAN dan/atau lembaga pelatihan lainnya yang terakreditasi A. Pelatihan pertanian adalah pelatihan untuk mempersiapkan SDM pertanian yang menguasai kemampuan dalam bidang tertentu, dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan standar lainnya, sehingga siap

bekerja pada lembaga pemerintah, industri atau berwiraswasta secara mandiri.

- f. Link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industry dengan ketersediaan tenaga kerja belum optimal.
- g. Kurangnya jumlah dan tidak meratanya sebaran spesialisasi Widyaiswara, serta kurangnya kapasitas dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya. Tenaga kediklatan yang ada saat ini disamping jumlahnya kurang (57 orang) dan tidak merata kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan setiap bagian/bidang, 47,76% masih berpendidikan SLTA ke bawah. Dari keseluruhan tenaga balai yang ada baik Widyaiswara maupun tenaga kediklatan baru empat orang yang mengikuti *Management of Training* (MOT) dan delapan orang yang mengikuti *Training Officer Course* (TOC) yang dipersyaratkan bagi tenaga kediklatan.
- h. Prasarana dan sarana pelatihan masih belum memadai, seperti berikut ini:
 - 1). Sarana dan prasarana laboratorium masih belum sesuai dengan tuntutan teknologi yang berkembang saat ini. Jumlah dan mutu peralatan laboratorium yang ada (laboratorium pengolahan hasil, penyuluhan, pembenihan, agensia hayati) dan belum mempunyai laboratorium yang lain seperti laboratorium kultur jaringan, organisme pengganggu tanaman, dan pangan. Disamping itu kapasitas ruang laboratorium belum memadai untuk tempat praktek sejumlah peserta pelatihan 30 orang.
 - 2) Sarana dan prasarana praktek di lahan terbuka belum tertata rapi seperti kubung jamur, *screen house* hidroponik, bengkel alsintan, *screen house* rumah kompos; lahan sawah mempunyai permasalahan dalam hal irigasi pada lahan surjan dan dan rawa, sedangkan lahan kebun seperti kebun sawit,

kakao, karet belum tertata dengan baik. Belum ada lahan yang disediakan secara khusus untuk pertanian organik dan belum ada sarana praktek untuk airoponik dan aquaponik. Masih terdapat lahan yang perlu dibuka dan ditata agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan praktek dan lahan produksi.

- i. Standarisasi mutu layanan kediklatan sudah menggunakan ISO 9001:2008 namun penerapannya belum dilakukan secara ketat dan konsisten.
- j. Program pelatihan yang dilaksanakan di BBPP Binuang belum semuanya diakreditasi. Dari sejumlah diklat yang diakreditasi belum ada program diklat yang mendapat nilai A. Sampai saat ini terdapat enam program diklat yang telah diakreditasi, yaitu Diklat Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B; Diklat Optimalisasi Rancang Bangun Paket Teknologi Lahan Rawa Pasang Surut (15 hari, 120 JP) dengan nilai akreditasi B; Diklat Teknis Budidaya Padi Organik (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi C; Diklat Agribisnis Kelapa Sawit (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B; Diklat Agribisnis Karet (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B; dan Diklat Teknis Budidaya Padi Lahan Rawa (7 hari, 56 JP) dengan nilai akreditasi B.
- k. Minat kerjasama Satker pertanian maupun non pertanian, organisasi/kelembagaan untuk kerjasama di wilayah binaan BBPP Binuang masih rendah
- l. Kerjasama dengan instansi lingkup pertanian tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi di wilayah kerja BBPP Binuang terdapat pelatihan kerjasama yaitu pada pelatihan vokasi dan tematik. Kerjasama pelatihan yang sering dilaksanakan yaitu Pelatihan fungsional (Fungsional Dasar Penyuluh Pertanian Ahli, Fungsional Dasar Penyuluh Pertanian Terampil, dan Fungsional Alih Kelompok Bagi Penyuluh Pertanian) yang sangat dibutuhkan oleh para peserta diklat karena merupakan persyaratan bagi

jabatan fungsional yang bersangkutan. Mulai tahun 2020 pelatihan kerjasama akan ada penambahan 2 (dua) pelatihan pada pelatihan fungsional dasar yaitu pelatihan dasar fungsional pengawas benih tanaman ahli dan pengawas organisme pengganggu tanaman ahli. Pada pelatihan tematik kerjasama yang ditawarkan adalah pelatihan tematik kakao, pengelolaan kebun karet, dan sistem integrasi sapi-kelapa sawit. Untuk pelatihan vokasi, kerjasama yang ditawarkan adalah pelatihan vokasi asisten kebun kelapa sawit, hidroponik, mandor kebun sawit untuk mandor panen, mandor kebun sawit untuk pemeliharaan, pelaksana panen dan pasca panen sawit, pengolahan rawa, pengolahan susu kedelai, pertanian organik, dan produksi benih tanaman.

- m. Kerjasama dengan perusahaan sangat mendukung untuk pertanian organik, perbenihan dan perkebunan sawit atau karet, sesuai dengan mandat BBPP Binuang menyiapkan pendidikan dan pelatihan Perkebunan. Banyak nya perusahaan perkebunan di wilayah kerja BBPP Binuang sangat membuka peluang sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang berbasis *JOB CREATOR* dan *JOB SEEKER*.
- n. Wilayah kerja BBPP Binuang se Kalimantan masih memiliki lahan pertanian yang sangat luas yang belum dimanfaatkan.

2) Peluang (*Opportunity*)

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai peluang diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis, Peningkatan volume ekspor produk pertanian dalam lima tahun terakhir sebagai bukti bahwa produk pertanian Indonesia memiliki kuantitas, kualitas, kontinuitas dan daya saing terhadap komoditas sejenis di luar negeri. Capaian ini salah satunya didukung oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor

pertanian. Sumberdaya manusia pertanian kompeten, profesional, berdayasaing dan berjiwa wirausaha yang menguasai IPTEK dan teknologi informasi merupakan pengungkit Peningkatan Ekspor Produk Pertanian.

- b. Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi.
Kebutuhan energi makin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia. Pengembangan energi terbarukan menjadi tantangan bagi setiap negara guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menurun ketersediannya. Salah satu alternatif yakni dengan mencari sumber bahan bakar baru bersifat ramah lingkungan, dengan stok bahan bakunya terjamin, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dari bahan bakar pada umumnya
- c. Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi

Di era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dan tersedianya sistem pembiayaan baik yang tradisional maupun berbentuk layanan online (*financial teknologi/fin-tech*), fasilitasi Pemerintah melalui kemudahan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), layanan asuransi usahatani serta akses untuk memperoleh berbagai informasi dan teknologi baik dari kelembagaan pertanian (BPTP, UPT Pendidikan dan Pelatihan, BPP) dapat mendorong generasi milenial untuk terjun kedalam sektor pertanian sebagai bisnis.

- d. Bonus demografi, Pada periode bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki peluang atau kesempatan besar (*window of opportunity*) untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil

- e. Petani, penyuluh, widyaiswara dan lainnya dapat diarahkan untuk menyasar komoditas strategis yang berdaya saing ekspor,
- f. Pengembangan teknologi ramah lingkungan,
- g. Adanya petani milenial yang berada di wilayah kerja BBPP Binuang,
- h. Masih tersedia lahan produktif yang belum termanfaatkan untuk pertanian,
- i. Industri 4.0 memberikan peluang bagi para petani milenial untuk memperluas jejaring kerja sama dan meningkatkan produktivitas pertaniannya,
- j. Distribusi dan pemasaran produksi pertanian,
- k. Hubungan koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan instansi pertanian dan diluar pertanian wilayah kerja BBPP Binuang,
- l. Kepercayaan pengguna jasa pelatihan terhadap kompetensi BBPP Binuang dalam melaksanakan pelatihan,
- m. Tersedianya dana pemerintah kabupaten dan provinsi, BUMN dan Swasta di wilayah kerja untuk pelaksanaan Kerjasama pelatihan dengan BBPP Binuang,
- n. Terdapat pusat pelatihan pertanian dan perdesaann swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Binuang yang memiliki kemampuan yang baik untuk Kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan non aparatur.

3) Tantangan (Threat)

- a. Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal
- b. Tingkat pengangguran masih tinggi
- c. Kondisi perekonomian global
- d. Perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, dan bencana alam
- e. Peningkatan kapasitas SDM Pertanian di Era Tatanan Baru, Pandemi Covid 19 berdampak pada perlunya penyesuaian arah dan kebijakan. Kebijakan yang baik tidak mungkin dilaksanakan

apabila SDM yang menjalankan kebijakan tersebut tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakannya. Pergeseran alokasi anggaran Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional juga berdampak pada terbatasnya dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan program pembangunan lainnya termasuk peningkatan kapasitas SDM Pertanian. Untuk itu diperlukan perubahan cara dan pola kerja yang berfokus pada physical distancing yang memaksa sebagian besar aktivitas dilakukan melalui media virtual. Kondisi tatanan baru (new normal) dapat menjadi momentum untuk menata ulang sistem dan metode penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian serta menciptakan lingkungan kerja baru dengan tetap memperhatikan kualitas dari pelayanan publik dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM pertanian.

f. Mempersiapkan SDM di Era VUCA

VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/kompleks dan Ambiguity/tidak jelas) adalah suatu kondisi dimana perubahan yang kita hadapi berlangsung sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol kebenaran serta realitas yang menjadi sangat subyektif. Menghadapi era VUCA tersebut yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien melalui 1) Hadapi volatility dengan fleksibilitas, 2) beralih dari uncertainty ke memahami, 3) Mengatasi Complexity dengan membangun koneksi dan 4) Mengatasi Ambiguity dengan agility (kelincahan). Terkait dengan hal tersebut maka pengembangan SDM Pertanian juga harus mampu mempersiapkan SDM menguasai teknis pertanian tetapi juga mampu menghadapi Era VUCA.

- g. Besarnya biaya transportasi yang berasal dari luar wilayah Kalimantan Selatan untuk menghadiri pelatihan yang diselenggarakan di BBPP Binuang
- h. Tuntutan kebutuhan pengguna jasa pelatihan aparatur dan non aparatur yang semakin tinggi terhadap mutu pelatihan

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2020 - 2024. Dalam Renstra tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2020 - 2024 yaitu "Mewujudkan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani dan lumbung pangan dunia 2045" dan Visi Pembangunan SDM Pertanian adalah terwujudnya SDM pertanian yang Profesional, mandiri dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern."

Percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.". Misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi tersebut adalah:

(1) Misi Kementerian Pertanian adalah :

- A. Mewujudkan ketahanan pangan;
- B. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
- C. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

(2) Misi Pembangunan SDM Pertanian adalah :

- A. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
- B. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
- C. Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
- D. Menyelenggarakan reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non-aparatur pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

3. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
5. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan nonaparatur;
7. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
9. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
10. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
11. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
12. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
13. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknis pelatihan fungsional dan teknik di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
14. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
17. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
18. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

Seperti tercantum dalam uraian fungsi-fungsi di atas, BBPP Binuang memiliki kekhasan dalam pelaksanaan diklat teknis pertanian yaitu diklat teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut. Dalam pengertian teknologi pertanian di lahan pasang surut, tercakup pula teknologi pertanian di lahan rawa lebak.

Dalam mendukung visi Pusat Penyuluhan Pertanian Badan PPSDMP yaitu Terwujudnya penyelenggaraan diklat yang profesional untuk mendukung pembangunan pertanian-bioindustri berkelanjutan” maka pada tahun 2020 - 2024 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang menetapkan visi: “Menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing” mendukung Job Creator dan Job Seeker”.

B. Misi

Untuk dapat menjadi Center of Excellence dalam menyelenggarakan pelatihan untuk menghasilkan SDM pertanian yang profesional, inovatif, mandiri dan berdaya saing maka BBPP Binuang menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelatihan;
2. Mengembangkan ketenagaan diklat;
3. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan diklat;
4. Mengembangkan program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.
5. Menyiapkan pelatihan berbasis *Job Ceator* dan *Job Seeker*.

C. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Badan PPSDMP tujuan yang dicapai oleh BBPP Binuang adalah:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator:
 - a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target indeks skor 64 (th. 2020) sampai dengan dan 69,8 (th. 2024),
 - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target skor 90,4 (th. 2020) sampai dengan dan 95,2 (th. 2024),
 - c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 kkal/kapita/hari pada sampai dengan tahun 2024,
 - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) dengan target 57 gr/kapita/hari sampai dengan pada tahun 2024,
 - e. Prevelence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2 % (th. 2020) sampai dengan dan 5,0 % (th. 2024),
 - f. Food Insecutiry Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 % (th. 2020) sampai dengan dan nilai 4,0 % (th. 2024),
 - g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) sampai dengan dan 46,8 juta ton (th. 2024),
 - h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,5 juta ton (th. 2020) sampai dengan dan 2,9 juta ton (th.2024),
 - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20 % penerima BPNT (th.2020) sampai dengan dan 100 % penerima BPNT (th. 2024),

- j. Persentase pangsa pangan organik dengan target 5 % (th.2020) sampai dengan dan 20 % (th.2024).
- 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator:
 - a. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian dengan target Rp. 49,2 juta/tenaga kerja/tahun (th. 2020) sampai dengan dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja/tahun (th.2024),
 - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36 % (th. 2020) sampai dengan dan 3,76 % (th. 2024),
 - c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9 % (th. 2020) sampai dengan dan 5,0 % (th. 2024),
 - d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8 % (th. 2020) sampai dengan dan 6 % (th.2024),
 - e. NTP dengan target 103 (th. 2020) sampai dengan dan 105 (th. 2024).
 - 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dengan target 65 % (th. 2020) sampai dengan dan 75 % (th.2024).
 - 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan indikator Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (th. 2020) sampai dengan dan 90 % (th.2024).
 - 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (th.2020) sampai dengan dan 82,96 (th. 2024),

- b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga 2024.
- 6. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian;
- 7. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung penumbuhan dan pengembangan penyiapan pencari kerja sektor pertanian;
- 8. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dan pekerja bidang pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing pertanian
- 9. Memperkuat kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian mendukung Penguatan dan Pengembangan Penyuluhan/Pedampingan Petani dan Korperasi Petani

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

SS1. Meningkatnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
- b. Peningkatan Akses Pangan
- c. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
- d. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan

- e. Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani
- f. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
- g. Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
- h. Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan
- i. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
- j. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

SS2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut

- a. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
- b. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional

SS3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi produk dan inovasi pertanian, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut

- a. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
- b. Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi

SS4. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan Pertanian Nasional, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut

- a. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya
- b. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya

SS5. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut

1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Berdasar dengan sasaran strategi dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDM, maka BBPP Binuang sebagai UPT di bawah lingkup SDP mempunyai strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, dengan indicator kinerja sasaran strategis (IKSS) persentase petani menerapkan teknologi,
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian nasional dengan IKSS persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya dan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya,
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel, dengan IKSS nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dan nilai kinerja anggaran Kementerian pertanian.

Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan SDM pertanian yang ada di dalam Renstra BPPSDMP sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra BPPSDMP.

Untuk mencapai sasaran BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu:

1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani),
2. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan
3. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Program Utama Kementerian Pertanian yang didukung oleh Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, adalah:

1. Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
2. Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan;
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
4. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
5. Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan;
6. Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas;
7. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit;
8. Pengentasan daerah rentan rawan pangan (family farming, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta
9. Penguatan layanan perkarantinaaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM);
dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.
- f. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan
- g. Pengembangan Food Estate

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

B. Strategi

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan Inovasi pertanian telah terbukti menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- a. Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian
- b. Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- c. Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna.
- d. Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP

- e. Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
 - f. Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.
2. **Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan**

Pertanian Nasional

- a) Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertaniang dengan Langkah operasional sebagai berikut:
- Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan agar berdaya saing di tingkat nasional dan internasional melalui perbaikan fasilitas, sarana prasarana praktet, dan peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.

- Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- b) Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan Langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
 - Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Terwujudnya pendampingan pembentukan Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
 - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan DPM/DPA
- c) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan Langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha
 - Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;

- Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
- Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- Pengawalan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP;
- Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP;
- Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP

d) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan Langkah operasional sebagai berikut:

- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
- Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha
- Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
- Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
- Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- Pengawalan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP;
- Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP;
- Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan food estate/KSPP

e) Komando strategis Pembangunan Pertanian

Untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan berbasis teknologi informasi sehingga tercipta kesamaan arah maka diperlukan komando strategis pembangunan pertanian. Tujuan yang akan dicapai adalah mensinergikan semua pemangku kepentingan (stakeholder)

pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan

Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia

f) **Pengarusutamaan Gender (PUG)**

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

3. **Strategi mewujudkan reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima**

a. **Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:**

- Penerapan manajemen talenta ASN;
- Peningkatan sistem merit ASN;
- Penyederhanaan eselonisasi;
- Penataan jabatan fungsional;

b. **Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:**

- Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
- Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi;
 - Penguatan pelayanan terpadu.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dijadikan pedoman bagi BBPP Binuang adalah kerangka regulasi yang disusun oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Kerangka regulasi selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian, kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pengembangan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur pertanian. Regulasi yang akan disusun meliputi:

- a. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/OT.160/12/2013 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
- b. Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/ 4/2014 tentang Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi;

- c. Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Teknologi Pertanian, Kesehatan Hewan, Perkarantinaaan Pertanian, Penyuluhan Pertanian, dan Manajemen Agribisnis.

C. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance;
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan

8. Mindset dan Cultural Set Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan organisasi, sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga.

Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis, serta penataan simplifikasi birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administratif dan pengawas sehingga terwujud aparatur BPPSDMP yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang memiliki fungsional khusus terdiri atas: (1) Widyaiswara; (2) Perencana; (3) Pustakawan; (4) Pranata Komputer; (5) Arsiparis; (6) Analis Kepegawaian; (7) Pranata Humas; (13) Analis Keuangan.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dan instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian sehingga penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2020 - 2024 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang didukung oleh aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 52 orang (data per Juli 2020). Jumlah ASN bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, yang disebabkan oleh antara lain: mutasi pegawai baik kedalam maupun keluar, pensiun, meninggal dunia, rekrutmen baru (CPNS), promosi dan demosi pegawai.

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Upaya yang sedang Kementerian Pertanian melakukan penyetaraan

jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengalihkan 9 jabatan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional, penyusutan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial yang dilakukan juga dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang profesional.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan BBPP Binuang ke daerah dilakukan dengan memperhatikan Kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tata laksana Kementerian Pertanian harus

dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (good governance).

IV. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

A. Program

Pada Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Tahun 2020-2024 Revisi I, mengacu pada Badan PPSPDM Pertanian yaitu program **Peningkatan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi)**, yang dijabarkan pada kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Kegiatan Pemantapan Pelatihan Vokasi pertanian dalam meningkatkan kesempatan kerja SDM pertanian, produksi dan daya saing pertanian yang berorientasi ekspor. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Pusat Pelatihan Pertanian merumuskan kegiatan dan indikator kedalam empat pilar yaitu : (i) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; (ii) Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (iii) Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian; (iv) Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan. Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi menjadi yaitu: Pelatihan Vokasi

B. Program Aksi

1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan). Kostratan dimaksudkan sebagai gerakan satu komando dari pusat

sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian yang melibatkan eselon 1 lingkup kementerian pertanian dan kementerian/lembaga lainnya. Kostratan terdiri atas Komando strategis pembangunan pertanian nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Komando strategis pembangunan pertanian wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando strategis pembangunan pertanian daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten, dan Komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani) yang berkedudukan di kecamatan.

Kostratani merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang terkoneksi ke Agricultural War Room (AWR) di Kostratanas; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian; 3) Pusat pembelajaran merupakan wadah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, Percontohan (Sekolah Lapang /Demplot /Demfam /Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis merupakan tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

b. Tujuan

KOSTRATAN bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional;
- 2) Penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di kecamatan berbasis Teknologi Informasi.

c. Rencana Aksi

KOSTRATAN dilaksanakan melalui tahapan prakondisi, perencanaan, dan pelaksanaan.

1) Prakondisi

Kebijakan KOSTRATAN diawali dengan konsultasi, Focus Group Discussion (FGD), rapat koordinasi, penyusunan regulasi, dan sosialisasi. Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian di KOSTRATAN, perlu didukung gerakan di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam kesatuan komando.

2) Perencanaan

Perencanaan KOSTRATAN diawali dengan:

- (a) Desain Agriculture War Room (AWR) di tingkat pusat, dan Agriculture Operation Room (AOR) di provinsi;
- (b) Penguatan sarana prasarana teknologi informasi di BPP;
- (c) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KOSTRATAN;

- (d) Simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundangan.

3) Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan KOSTRATAN:

- (a) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian.
- (b) Meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya.
- (c) Meningkatkan jejaring kerja KOSTRATAN dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah.
- (d) Meningkatkan peran pemimpin non formal masyarakat (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dll) dalam pembangunan pertanian.

4) Organisasi Pelaksana

Organisasi KOSTRATAN terdiri atas: 1) KOSTRATANI berkedudukan di BPP; 2) KOSTRADA berkedudukan di dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian; 3) KOSTRAWIL berkedudukan di BPTP di Provinsi; dan 4) KOSTRANAS berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

2. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial

a. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan kemajuan Indonesia ke depan. Kementerian Pertanian menetapkan program Penumbuhan Pengusaha

Pertanian Milenial sebagai salah satu program utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024.

Generasi milenial erat kaitannya dengan dengan teknologi, khususnya teknologi informasi dan media sosial. Generasi milenial yang tanggap terhadap perubahan teknologi dan memiliki daya kreativitas yang tinggi, menjadikan peluang untuk menjadi wirausaha sektor pertanian semakin terbuka lebar.

Program Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial didorong oleh: (1) Meningkatnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian dapat mendorong percepatan pembangunan pertanian; (2) Kemajuan dibidang teknologi informasi, inovasi teknologi dan mekanisasi bidang pertanian menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk terjun di sektor pertanian; dan (3) peningkatan investasi di sektor pertanian, pemberian insentif berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian, program Gerakan Tiga Kali Ekspor dll. dapat memicu tumbuh dan berkembangnya pengusaha pertanian milenial.

b. Tujuan

Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan minat generasi muda pertanian untuk berusahatani;
- 2) Menciptakan pengusaha pertanian yang adaptif terhadap perubahan teknologi yang modern;
- 3) Penciptaan lapangan kerja;
- 4) Regenerasi Petani.

c. Sasaran

Sasaran Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial BBPP Binuang meliputi:

- 1) Mahasiswa, Siswa, Alumni Pendidikan Vokasi Pertanian dan Perguruan Tinggi Mitra yang mengikuti Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP);
 - 2) Peserta pelatihan dan atau permagangan dibidang pertanian;
 - 3) Pelaku utama maupun pelaku usaha lainnya yang dibina BBPP Binuang dan BPPSDMP.
- d. Strategi pelaksanaan:
- 1) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam menumbuhkan pengusaha pertanian milenial;
 - 2) Meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya;
 - 3) Meningkatkan jejaring kerja dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah;
 - 4) Meningkatkan peran pemimpin non formal kemasyarakatan (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dll) dalam pembangunan pertanian.
3. Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian
- a. Latar Belakang
- Aspek yang paling berperan dalam pemenuhan pangan dan pertanian adalah sumber daya manusia pertanian, yang terdiri atas pelaku utama, pelaku usaha, serta petugas. Adapun tujuan pembangunan pertanian yaitu menyediakan pangan, tingkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor.

Peningkatan kualitas SDM Pertanian menjadi fokus utama dari pilar Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yakni pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian BBPP Binuang harus mampu mendorong dan menghasilkan generasi muda pertanian yang maju, mandiri dan modern. Sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagai unit kerja Eselon II di Badan PPSDMP Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

b. Tujuan

Penyiapan SDM melalui pelatihan untuk mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, yang meliputi:

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi;
- 2) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
- 3) Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Daya Saing Perkebunan;
- 4) Peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas;

5) Peningkatan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian.

c. Sasaran

Pelaku utama, pelaku usaha, tenaga teknis pertanian, penyuluh pertanian, dan stakeholders terkait.

d. Strategi

- 1) Koordinasi dengan eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 2) Identifikasi kebutuhan latihan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelatihan;
- 4) Pengawasan dan pendampingan.

2.1 Struktur Program dan Kegiatan BBPP Binuang berdasarkan fungsi :

Sesuai dengan tugas dan fungsi BBPP Binuang mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Program	Kegiatan	Fungsi
Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPP Binuang	Ekonomi

2.2 Kegiatan Utama BBPP Binuang

1. Pelatihan teknis mendukung program prioritas

Dalam rangka peningkatan kompetensi ilmu terapan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja lainnya melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan penyelenggaraan, kurikulum dan metode pembelajaran.

Pengembangan kurikulum vokasi diselaraskan dengan standar kompetensi kerja, permintaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan tiga kriteria utama yaitu permintaan pasar tenaga kerja (demand-driven), keterhubungan antara pemberi kerja (industri) dengan lembaga pendidikan vokasi (link), dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri (match) dimana tingkat keberhasilan pelatihan vokasi terukur dengan peningkatan hasil kerja dan keterserapan lulusan vokasi sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

2. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian

Untuk pengembangan kurikulum yang memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKK khusus dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI/KKNI).

3. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dilakukan melalui: pertama meningkatkan peran Pimpinan Daerah untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas teknis fungsional lainnya di lapangan, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian. Kedua meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan pertanian dan Kementerian/Lembaga lainnya. Ketiga meningkatkan jejaring kerja Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan (Kostratani) dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta di daerah.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat gerakan Kostratani di kecamatan perlu dioptimalkan tugas, fungsi dan perannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan

nasional. Peran BPP tersebut meliputi: 1) Pusat Data dan Informasi Pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang disajikan dalam Agricultural Operation Room (AOR) dan selanjutnya akan disampaikan ke Agricultural War Room (AWR) di tingkat Kementerian Pertanian; 2) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat Pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian /Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat Konsultasi Agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait; dan 5) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Untuk operasionalisasi kegiatan dan peningkatan peran serta fungsi Kostratani, maka perlu didukung sarana dan prasarana di BPP dalam bentuk perangkat pengolah data, informasi dan komunikasi untuk penyuluh pertanian untuk melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan.

Untuk mendorong berfungsi nya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Kostratani, BBPP Binuang membina BPP secara intensif untuk menjadi model BPP Kostratani. Pembiayaan BPP dapat bersumber dari APBN dan PHLN. Berfungsinya BPP Kostratani di tunjukkan dengan indikator antara lain : 1) Tersedia data dan informasi pertanian; 2) Terlaksananya Program Utama Kementerian Pertanian di masing – masing Eselon I; 3) Terkoneksi dengan AWR melalui laporan mingguan ke Dinas Kab/Kota. Terkoneksi dengan AOR Badan PPSDMP dan Eselon I Pembina; 4) Terdapat fasilitas belajar (demplot/percontohan penerapan

teknologi pertanian); 5) Terdapat informasi/cara akses modal ke Lembaga keuangan, pasar, dll; 6) Memiliki mitra/jejaring kerjasama antara lain koperasi, RMU, dan lain lain.

4. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani

Kelembagaan petani dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar anggota dan antar kelompok lain, sehingga mampu memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya, dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan/Gapoktan, meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani agar kelembagaan petani dapat menjadi korporasi petani yang lebih terarah dalam berusaha tani dengan orientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah dan kesejahteraan petani dengan berbasis kawasan pertanian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Korporasi dapat berbentuk Koperasi, CV, BUMS, dan PT.

a. Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama

Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan strategi meliputi:

- 1) Koordinasi rencana program, anggaran dan kerjasama;
- 2) Penajaman program skala prioritas;
- 3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan;
- 4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri;
- 5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan

penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja;

b. Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel

Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), strategi tersebut meliputi:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN;
- 2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;
- 3) Akuntabilitas laporan keuangan;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan;
- 5) Pengembangan tata kelola keuangan.

c. Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

d. Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BBPP Binuang dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif BBPP Binuang. Strategi meliputi:

- 1) Penguatan data SDM pertanian;
- 2) Pengembangan e-evaluation;
- 3) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI;
- 4) Pengembangan dan penguatan sistem;
- 5) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
- 7) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital;
- 8) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi;

e. Peningkatan Kualitas Pemuda Tani

Peningkatan kualitas pemuda tani dilaksanakan melalui Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dengan sasaran meliputi Mahasiswa, Siswa, Alumni, Pemuda Tani dan Kelompok Santri Tani Milenial. Peningkatan kualitas pemuda tani juga dilakukan melalui pemagangan (retooling).

Sektor pertanian saat ini dihadapkan pada rendahnya jumlah rumah tangga tani dan menurunnya minat para generasi muda untuk bekerja dan berusaha tani. Pemuda di pedesaan lebih memilih bekerja pada sektor industri di kota, meskipun keterampilan yang dimiliki tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan mengalirnya arus tenaga kerja pedesaan ke perkotaan. Di sisi lain, tenaga terdidik pertanian, sedikit yang

memilih untuk bekerja di sektor pertanian, bahkan di antaranya mereka banyak yang memilih bekerja di luar sektor pertanian.

Rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik yang bekerja di sektor pertanian dan dengan semakin terbukanya akses potensi di bidang pertanian, maka pemberian bekal kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi, alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan atau pemuda tani dalam aspek teoritis maupun praktis secara proposional penting dilakukan. Pendekatan teoritis atau konseptual kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi mitra dan Polbangtan dan atau pemuda tani untuk memberikan kesempatan mengembangkan daya nalar dan analisisnya memecahkan permasalahan atas fenomena yang ada. Pandangan praktis memberikan kemampuan peserta didik, alumni perguruan tinggi, alumni Polbangtan dan pemuda tani mengimplementasikan hasil daya nalar dan analisisnya secara riil dengan melakukan sesuatu yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha muda pertanian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani, dan KSTM bertindak sebagai Agri-sociopreneur atau pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian. Pada program penumbuhan wirausaha muda pertanian ini, kelompok wirausaha muda pertanian mengajukan proposal wirausaha agar mendapatkan bantuan modal. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Target kelompok baru yang mendapatkan bantuan modal, dari tahun ke tahun meningkat, dengan harapan entrepreneur muda pertanian semakin banyak tercetak.

Kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian meliputi:

- 1) Penyusunan *Business Plan*, pendampingan, dan pelaksanaan usaha; dan
- 2) Monitoring melalui: Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing sepanjang pelaksanaan kegiatan;
- 3) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian kinerja usaha yang dilakukan oleh tim evaluasi pada akhir tahun berjalan.
- 4) Pengembangan jejaring usaha dalam rangka perluasan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan, investor, pemasok input dan lembaga pemasaran;

2.3 Indikator Kinerja Sasaran Program

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran strategis. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh BBPP Binuang. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan kinerja; dan (5) melakukan evaluasi SAKIP.

IKSP BBPP Binuang 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. IKSP BBPP Binuang 2020 – 2024

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Pelatihan Vokasi	Termanfaatkannya teknologi pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)
		Meningkatnya kualitas SDM Pertanian Nasional	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai PMPRB BBPP Binuang (Nilai)
		Terwujudnya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang (Nilai)

2.4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 yaitu pada Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Kerja Mandiri/UPT. Adapun rincian IKSK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPSDMP Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
I. PROGRAM PELATIHAN VOKASI			
1	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		melalui pelatihan vokasi pertanian	
		Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4)
II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BBPP Binuang	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi BBPP Binuang	Nilai PMPRB BBPP Binuang (Nilai)
			Nilai AKIP BBPP Binuang berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)
			Level maturitas penyelenggaraan SPI BBPP Binuang (Level)
			Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan kementerian pertanian terkait BBPP Binuang yang ditindaklanjuti BBPP Binuang (%)
			Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti BBPP Binuang terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal (%)
		Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Binuang	Nilai Kinerja Anggaran BBPP Binuang (Nilai)
		Meningkatnya kualitas layanan BBPP Binuang	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan BBPP Bnuang (Skala Likert 1-4)

Rincian target IKSP dan IKSK tahun 2020 – 2024 sebagaimana dalam lampiran 1 dan 2.

2.5 Target kinerja dan anggaran BBPP Binnuang 2020 – 2024 (Semula)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP ₁	Ternmanfaatkannya teknologi pertanian												
	IKSP ₁ Petani yang menerapkan teknologi	persen	70	75	80	85	90						
SP ₂	Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia dan kelenbagaan pertanian nasional												
	IKSP ₂ Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	persen	60	75	80	85	90						
	IKSP ₃ Persentase kelenbagaan petani yang meningkat kapasitasnya	persen	18	19	20	21	22						
SP ₃	Birokrasi BBPP Binnuang yang efektif dan efisien												
	IKSP ₄ Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPP Binnuang aspek Pemenuhan dan Reform	Nilai	33-25	33-50	33-75	34-00	34-25						
SP ₄	Tertelolanya anggaran BBPP Binnuang yang akuntabel dan berkualitas												
	IKSP ₅ Nilai kinerja anggaran BBPP Binnuang	Nilai	90	91	92	93	94						
SK ₁	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelenbagaan pertanian nasional												

2.6 Target kinerja dan anggaran BBP Binuang 2020 – 2024 (Menjadi)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SP1	Termasuknya teknologi pertanian												
	IKSP1 <i>Persentase petani yang menerapkan teknologi</i>	persen	70	75	80	85	90						
SP2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian												
	IKSP2 <i>Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya</i>	persen	60	75	80	85	90						
SP3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian												
	IKSP3 <i>Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya</i>	Persen	18	19	20	21	22						
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian												
	IKSK1 <i>Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya</i>	%	60	75	80	85	90						
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian												
	IKSK2 <i>Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian</i>	Skala Likert	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94						

Program/ Kegiatan			Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																
SP1	Birokrasi BBPP Binuang yang efektif dan efisien															
	IKSP1	Nilai PMPRB BBPP Binuang	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25								
SP2	Terkelolanya anggaran BBPP Binuang yang akuntabel dan berkualitas															
	IKSP2	Nilai kinerja anggaran BBPP Binuang	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80								

V. PENUTUP

Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha adalah salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan. Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kebijakan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang difokuskan pada optimalisasi peran, fungsi dan tugas Balai Pelatihan vokasi pertanian serta penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Renstra Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran kebijakan umum, strategi utama, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang periode tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 akan menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai target penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama kurun waktu 2020-2024.

Terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang berkewajiban untuk mengimplementasikan sasaran kebijakan umum (visi), strategi utama (misi), tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2020-2024.
2. Renstra Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang sama.

3. Penguatan peran stakeholders perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2020-2024. Penguatan peran stakeholders ini antara lain dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan- perusahaan, serta seluruh komponen terkait.
4. Renstra Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang 2020-2024 digunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan kinerja.